



DAMPAK PARIWISATA TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PENURUNAN KEMISKINAN DI INDONESIA

A. Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Perekonomian Indonesia

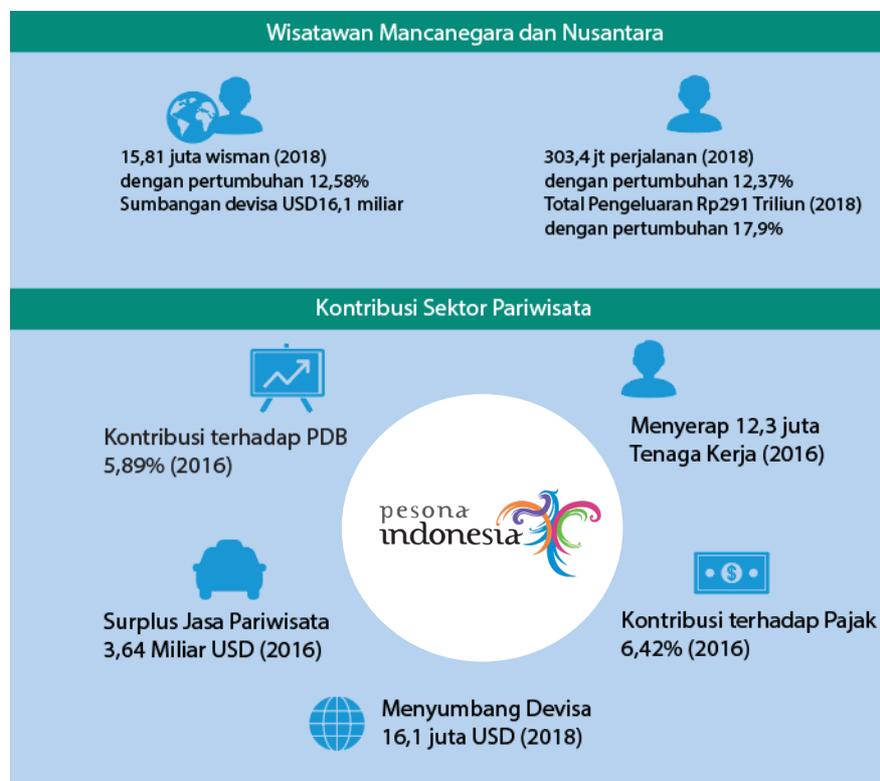
Sektor pariwisata memiliki peran yang semakin penting bagi perekonomian Indonesia pada tataran makro. Pada 2018 wisatawan mancanegara tercatat mencapai 15,81 juta orang dengan tingkat pertumbuhan 12,58% (BPS, 2019) dan sumbangan devisa USD 16,1 miliar (Kemenpar, 2019). Pada tahun yang sama, wisatawan domestik mencatat 303,4 juta perjalanan dengan pertumbuhan 12,37% (BPS, 2019) dengan pengeluaran total Rp291 triliun dan tingkat pertumbuhan 17,9% (Kemenpar, 2019).

Peran sektor pariwisata tersebut mampu mengurangi tekanan pada neraca pembayaran Indonesia yang pada 2018 lalu mencatat defisit USD7,1 miliar (BI, 2019). Pos neraca jasa perjalanan (pariwisata) dalam neraca perdagangan jasa dan neraca transaksi berjalan selalu mencatat surplus yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Sektor pariwisata mampu menciptakan 12,3 juta kesempatan kerja (SAKERNAS, 2016) dan saat ini diperkirakan lebih dari 13 juta orang bekerja di sektor ini.

Studi LPEM terdahulu (2018) juga menunjukkan peran penting pariwisata terhadap penciptaan *output* dan PDB nasional. Dengan menggunakan analisis Model IO yang mempertimbangkan *induced effect*, diperkirakan pada 2016 lalu kontribusi pariwisata terhadap *output* nasional sebesar 5,89% dan kontribusi terhadap PDB mencapai 5,82%.

Meskipun demikian, diperlukan studi lebih lanjut untuk melihat seberapa jauh kegiatan pariwisata berdampak terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.



B. Tantangan Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia

Pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia dan kontribusinya pada tataran ekonomi makro harus juga tercermin pada penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan pemerataan pendapatan, mengingat kedua hal tersebut tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDG)* nomor 1 dan 10.

Menurut BPS pada akhir 2018 lalu *gini ratio* Indonesia tercatat sebesar 0,384, sedikit lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih baik dari batas psikologis 0,4, tetapi masih menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup lebar.

Pada akhir 2018 lalu penduduk miskin Indonesia tercatat sebanyak 25,67 juta orang (9,66% dari jumlah penduduk). Meskipun terdapat tren penurunan penduduk miskin, tetapi jumlahnya secara absolut masih cukup besar.

Dengan latar belakang tersebut, studi ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak kegiatan pariwisata terhadap kelompok masyarakat miskin.
2. Menganalisis dampak kegiatan pariwisata terhadap pemerataan pendapatan masyarakat.
3. Mengidentifikasi model pengembangan pariwisata yang efektif meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat

Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan pariwisata yang tidak hanya berdampak secara makro, tetapi juga mampu memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.



C. Metodologi Studi

Secara garis besar, studi ini menganalisis aliran 'kue ekonomi' dari kegiatan pariwisata dan mengidentifikasi golongan kelompok pendapatan yang memperoleh nilai ekonomi tersebut. Jika aliran kue ekonomi tersebut mengalir lebih banyak ke kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, maka kegiatan pariwisata sangat potensial mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

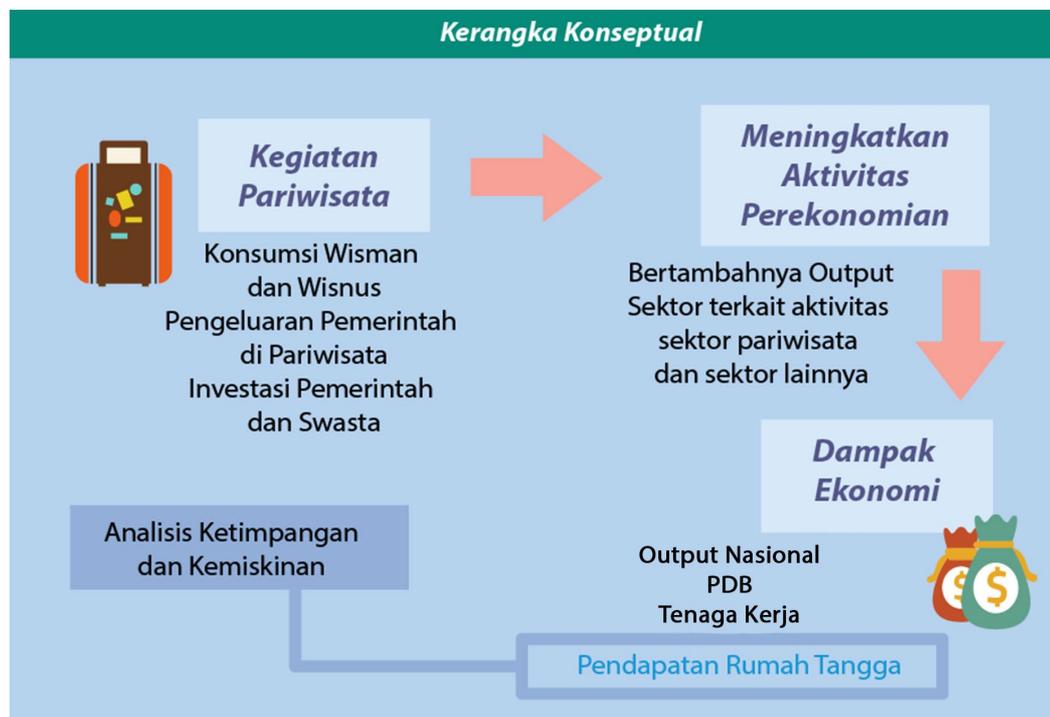
Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, studi ini menggunakan analisis *input-output* dengan model Miyazawa untuk mengidentifikasi dan mengestimasi persentase 'kue ekonomi' kegiatan pariwisata yang dinikmati oleh 10 kelompok pendapatan (dimana desil 1 adalah kelompok pendapatan terendah, sedangkan desil 10 adalah kelompok pendapatan tertinggi).

Selanjutnya, hasil analisis model Miyazawa dikombinasikan dengan data SUSENAS untuk

melakukan *micro simulation* untuk menghitung kontribusi pariwisata dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Simulasi ini dilakukan dengan membandingkan skema kondisi pasar bila ada aktivitas dan investasi sektor pariwisata dengan kondisi bila tidak ada aktivitas dan investasi di sektor pariwisata (dengan pariwisata vs tanpa pariwisata).

Untuk triangulasi, studi ini juga menggunakan model ekonometrika untuk menganalisis apakah kegiatan pariwisata memiliki dampak yang signifikan secara statistik dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Selain itu, studi ini menggunakan analisis kualitatif dengan survei lapangan untuk mengidentifikasi model pengembangan kegiatan pariwisata yang mampu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.



D. Hasil Analisis: Dampak Pariwisata terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

Secara ringkas, hasil analisis *micro simulation* menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan pariwisata terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2014, 2015, dan 2016 terlihat cukup besar. Tanpa adanya kegiatan pariwisata maka tingkat kemiskinan diperkirakan akan lebih tinggi sekitar 4% dari aktualnya.

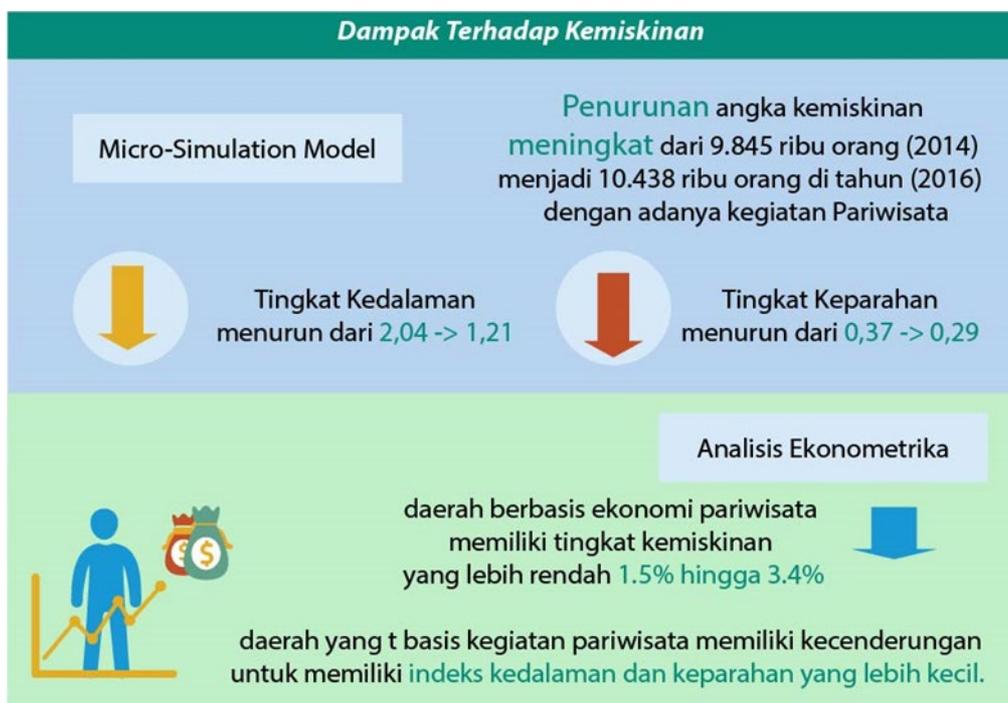
Selain itu, kegiatan pariwisata juga berkontribusi mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan dari 2,04 menjadi 1,21, serta pengurangan tingkat keparahan kemiskinan dari 0,37 menjadi 0,29 di tahun 2016. Dengan kata lain, tanpa kegiatan pariwisata, rata-rata pendapatan masyarakat miskin akan semakin jauh di bawah garis kemiskinan.

Hasil ini diperkuat dengan analisis ekonometrika yang menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi pariwisata memiliki tingkat kemiskinan yang

lebih rendah 1,5% hingga 3,4% dibandingkan daerah yang tidak memiliki basis ekonomi pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan koefisien dari variabel *dummy LQ index* yang bersifat negatif dengan kisaran antara 1,5 hingga 3,4.

Berkenaan dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, analisis ekonometrika juga menunjukkan bahwa daerah yang terasosiasi sebagai daerah dengan basis kegiatan pariwisata (*LQ index* yang lebih dari 1) memiliki kecenderungan untuk memiliki indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih kecil.

Temuan ini sejalan dengan data BPS yang mencatat bahwa kesempatan kerja dari pariwisata sebagian besar tercipta di kegiatan perdagangan (41%) dan penyediaan makanan (46%), suatu indikasi bahwa sebagian besarnya tercipta di sektor informal dan skala usaha mikro.



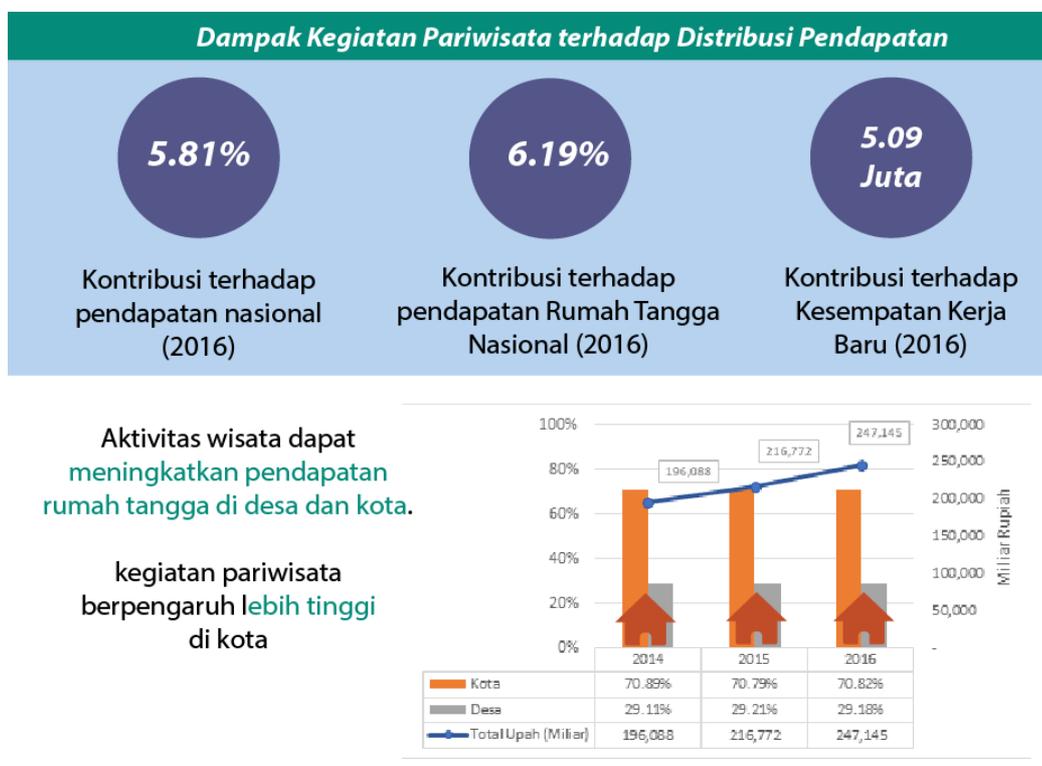
E. Dampak Pariwisata terhadap Distribusi Pendapatan

Pengeluaran wisatawan dan investasi pariwisata (baik oleh swasta maupun pemerintah) dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, baik di desa maupun kota. Akan tetapi, kegiatan pariwisata jauh lebih berpengaruh pada pendapatan rumah tangga di kota. Hasil analisis IO menunjukkan bahwa kelompok desil pertama atau kategori kelompok rumah tangga kota paling miskin menikmati peningkatan pendapatan paling besar, yaitu sebesar 8,4%.

Pada masyarakat di desa persentase peningkatan upah di desa meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak terlalu besar. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun aktivitas pariwisata mampu menetes sampai kepada kelompok pendapatan di desa tetapi porsi nya masih sangat kecil. Pada masyarakat di desa, kelompok desil kedua atau kategori kelompok rumah tangga kedua termiskin menikmati peningkatan pendapatan paling besar (6%).

Distribusi peningkatan upah di desa relatif seimbang pada kisaran 4% - 6% untuk seluruh kelas ekonomi. Hasil ini mengindikasikan bahwa penambahan upah dari kegiatan pariwisata relatif dirasakan secara seimbang oleh seluruh kelas masyarakat di desa.

Hasil analisis IO sejalan dengan analisis *micro simulation* yang membandingkan kondisi perekonomian dengan ada dan tidaknya aktivitas pariwisata. Secara hipotetis, adanya pariwisata mampu menurunkan *gini ratio* Indonesia dari 0,4192 menjadi 0,4190 pada 2015. Artinya, terdapat sedikit penurunan ketimpangan kesejahteraan akibat kegiatan pariwisata. Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil analisis ekonometrika yang menunjukkan bahwa daerah yang menjadi basis pariwisata cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang sedikit lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak berbasis pariwisata.

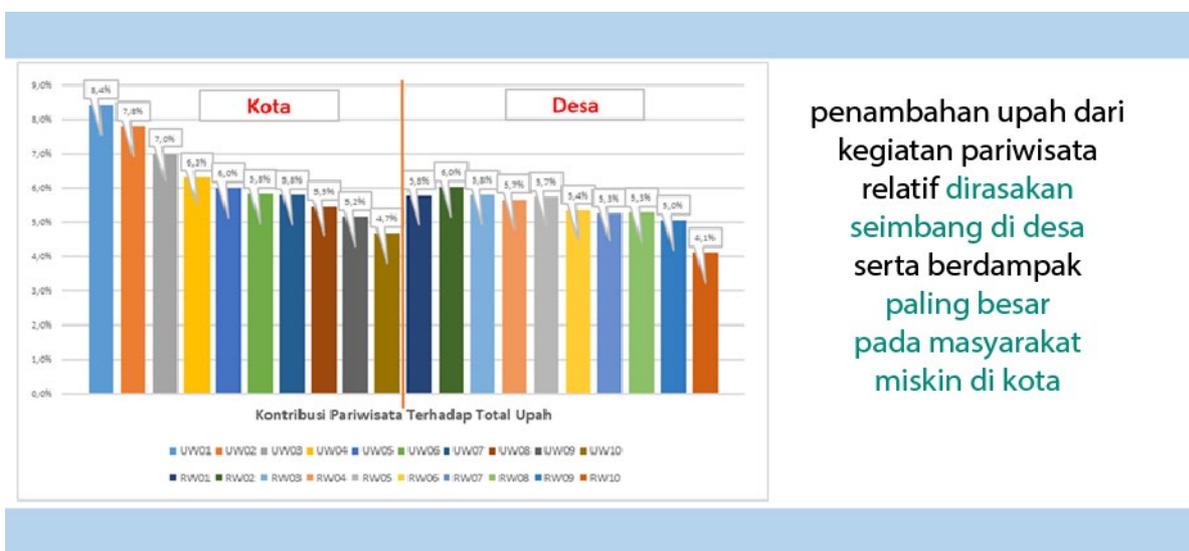


Analisis diperdalam dengan membandingkan dampak aktivitas wisatawan mancanegara dengan wisatawan nusantara. Dari sisi belanja wisatawan, pada tahun 2016 kontribusi wisatawan mancanegara dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga mencapai Rp156 triliun (3,93% dari pendapatan rumah tangga nasional), jauh lebih tinggi dibandingkan kontribusi wisatawan nusantara yang menciptakan tambahan pendapatan untuk rumah tangga sekitar Rp152 triliun (3,83% dari total pendapatan rumah tangga nasional). Akan tetapi, aktivitas wisatawan nusantara memberikan porsi yang lebih besar terhadap pendapatan masyarakat di desa (30%) daripada aktivitas wisatawan mancanegara (28%).

Apabila diamati lebih detil berdasarkan kontribusi per-desil pendapatan, aktivitas wisatawan nusantara memberikan kontribusi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas wisatawan mancanegara.

Rata-rata kontribusi aktivitas wisatawan nusantara pada desil 1 hingga desil 10 kelompok pendapatan mencapai 3,8% terhadap total upah pada masing-masing desil, sedangkan aktivitas wisatawan mancanegara rata-rata hanya sebesar 3,1%. Kelompok masyarakat yang menikmati kontribusi paling besar dari aktivitas wisatawan nusantara adalah desil 2 (4,1%) di desa dan desil 1 (5,6%) di perkotaan. Untuk aktivitas wisatawan mancanegara, kontribusi paling besar di desa dinikmati oleh desil 8 (3,4%) sedangkan di perkotaan dinikmati oleh desil 1 (4,7%).

Hasil ini menunjukkan bahwa upaya untuk memaksimalkan aktivitas pariwisata yang berasal dari wisatawan nusantara akan lebih berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat karena kelompok pendapatan (desil) bawah menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.



F. Studi Kasus Model Pengembangan Pariwisata

Studi kasus dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Magelang untuk mengidentifikasi model pengembangan pariwisata yang efektif meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki pemerataan pendapatan.

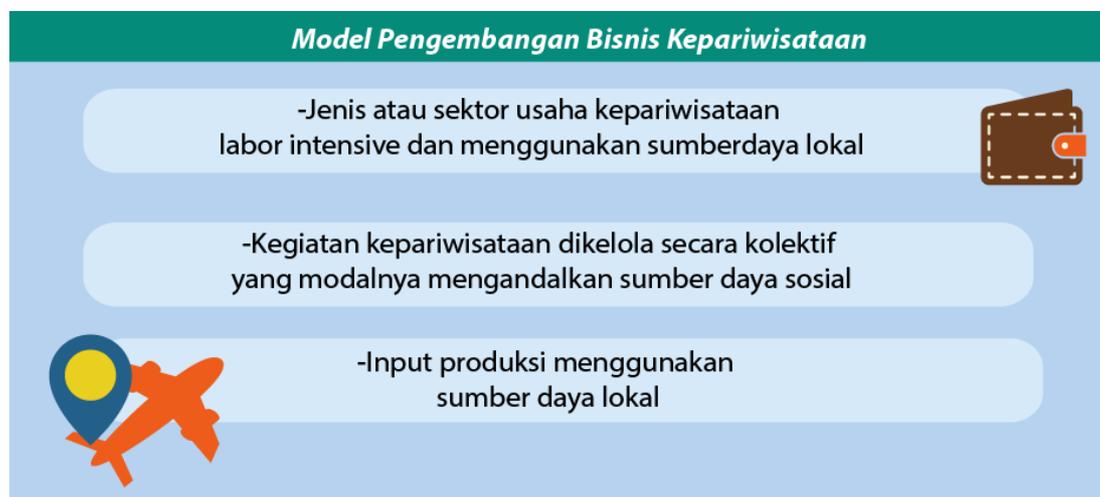
Di Kabupaten Banyuwangi, model pariwisata yang dibangun berbentuk *'Community Based Tourism'* (CBT), yang menekankan pada partisipasi komunitas dan masyarakat dalam peningkatan kegiatan pariwisata. Kabupaten Banyuwangi telah mencapai indikator-indikator pelaksanaan CBT yang baik (Russel, 2000; Suansari, 2003), meliputi penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan PDRB, peningkatan pendapatan per-kapita, serta peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Di Kabupaten Magelang, pemerintah berkomitmen untuk menempatkan pariwisata sebagai program unggulan, yang disusun dengan berpihak pada masyarakat kelas ekonomi menengah bawah (dinyatakan dalam Program Renstra Magelang). Program ini sudah mulai menunjukkan hasil dalam wujud bertumbuhnya berbagai lokasi wisata baru yang tersebar.

Dengan memaksimalkan peran pariwisata, PDRB Kecamatan Borobudur meningkat dari peringkat 13 menjadi peringkat 4 dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang pada 2018. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang juga menurun walaupun tidak berbeda signifikan bila dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk atau model pengembangan bisnis kepariwisataan yang berpotensi kuat dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat adalah sebagai berikut.

- 1) Bersifat *labor intensive* dan menggunakan sumber daya manusia lokal.
- 2) Dimiliki dan dikelola secara kolektif dengan modal yang mengandalkan kekuatan sumber daya manusia dan modal sosial (*social capital*).
- 3) Usaha pariwisata berskala besar, menengah, ataupun kecil, harus sebanyak-banyaknya menggunakan input/factor produksi yang tersedia dan diproduksi secara lokal.



G. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata memiliki dampak positif dalam menurunkan kemiskinan, baik dalam hal tingkat kemiskinan (*poverty headcount index*), tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*), maupun tingkat keparahan kemiskinan (*squared poverty gap index*). Selain itu kegiatan pariwisata juga memiliki peran dalam menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan (*gini ratio*).

Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan dari kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah-atas, namun juga mampu meningkatkan pendapatan dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah-bawah, termasuk diantaranya kelompok masyarakat miskin.

Meskipun demikian, secara kewilayahan didapati bahwa bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata bagi masyarakat miskin masih lebih dinikmati masyarakat perkotaan dibandingkan ke perdesaan. Hal ini disebabkan karena fasilitas pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran dan penyewaan kendaraan masih lebih banyak disediakan di daerah perkotaan.

Dampak kegiatan pariwisata terhadap penurunan kemiskinan juga dapat dibedakan berdasarkan asal wisatawannya. Kegiatan pariwisata yang dihasilkan oleh aktivitas

wisatawan nusantara berperan lebih besar dalam menurunkan indeks kemiskinan dibandingkan dengan wisatawan mancanegara. Selain itu, pengeluaran wisatawan nusantara juga relatif lebih terdistribusi ke kelompok pendapatan menengah-bawah dibandingkan wisatawan mancanegara, sehingga lebih efektif menurunkan ketimpangan pendapatan.

Studi kasus pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dengan model berbasis masyarakat (misal dengan tema desa wisata dan pariwisata berbasis sumber daya lokal) terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di perdesaan.

Agar kegiatan pariwisata lebih efektif sebagai instrumen penurunan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan pendapatan, pemerintah perlu menempuh kebijakan berikut:

- 1) Mengoptimalkan potensi wisatawan nusantara, disamping upaya yang gencar dalam menarik wisatawan mancanegara.
- 2) Mengarahkan kegiatan pariwisata ke daerah perdesaan seperti pengembangan model pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) dengan atraksi desa wisata yang berbasis sumber daya dan budaya lokal.

Tim peneliti: Dr. Riyanto, Dr. Djoni Hartono, Dr. Uka Wikarya, Mohamad D. Revindo, Ph.D., Usman, M.Si., Setya A. Riyadi, M.Si., Natanael W. G. Massie, S.E., Nanda Puspita, S.Si.

Acknowledgement: Studi ini dilaksanakan selama Februari-Juni 2019 atas dukungan dan kerja sama dari Kementerian Pariwisata, khususnya Keasdepan Industri dan Regulasi Pariwisata.